

CAPAIAN UHC JANUARI S.D MEI TAHUN 2025

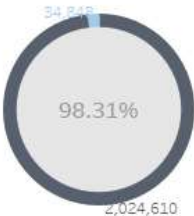
Januari

Capaian UHC (Universal Health Coverage)

Jumlah Penduduk JAWA TENGAH, BREBES: 2,059,458 jiwa



[* Click to detail](#)



- Capaian Peserta
- Selisih Terhadap Capaian

Sumber: Jumlah penduduk Nasional : Data dukcapil semester I tahun 2024

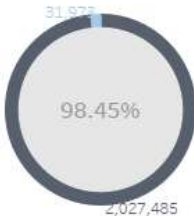
Februari

Capaian UHC (Universal Health Coverage)

Jumlah Penduduk JAWA TENGAH, BREBES: 2,059,458 jiwa



[* Click to detail](#)



- Capaian Peserta
- Selisih Terhadap Capaian

Sumber: Jumlah penduduk Nasional : Data dukcapil semester I tahun 2024

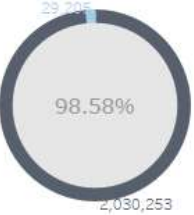
Maret

Capaian UHC (Universal Health Coverage)

Jumlah Penduduk JAWA TENGAH, BREBES: 2,059,458 jiwa



[* Click to detail](#)



- Capaian Peserta
- Selisih Terhadap Capaian

Sumber: Jumlah penduduk Nasional : Data dukcapil semester I tahun 2024

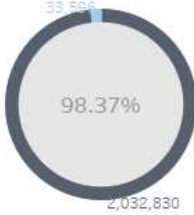
April

Capaian UHC (Universal Health Coverage)

Jumlah Penduduk JAWA TENGAH, BREBES: 2,066,426 jiwa



[* Click to detail](#)



- Capaian Peserta
- Selisih Terhadap Capaian

Sumber: Jumlah penduduk Nasional : Data dukcapil semester II tahun 2024

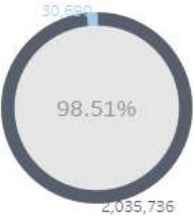
Mei

Capaian UHC (Universal Health Coverage)

Jumlah Penduduk JAWA TENGAH, BREBES: 2,066,426 jiwa



[* Click to detail](#)



- Capaian Peserta
- Selisih Terhadap Capaian

Sumber: Jumlah penduduk Nasional : Data dukcapil semester II tahun 2024

Juni

Capaian UHC (Universal Health Coverage)

Jumlah Penduduk JAWA TENGAH, BREBES: 2,066,426 jiwa



[* Click to detail](#)



- Capaian Peserta
- Selisih Terhadap Capaian

Sumber: Jumlah penduduk Nasional : Data dukcapil semester II tahun 2024

Juli

Capaian UHC (Universal Health Coverage)

Jumlah Penduduk **JAWA TENGAH, BREBES**: 2,066,426 jiwa



[*Click to detail](#)



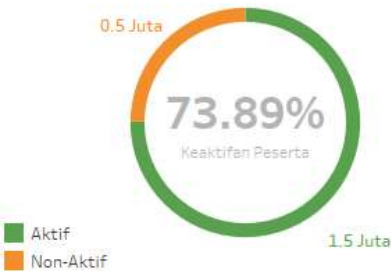
- Capaian Peserta
- Selisih Terhadap Capaian

Sumber: Jumlah penduduk Nasional : Data dukcapil semester II tahun 2024

TINGKAT KEAKTIFAN PESERTA JKN

Januari

Komposisi berdasarkan Status Aktif Peserta
Periode: January 1, 2025

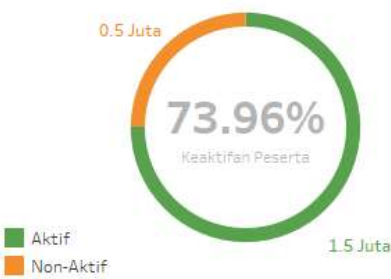


berdasarkan Segmen Kepesertaan

PBPU PEMDA	63.13%	36.87%
PBI JK	82.72%	
BP	88.51%	
PBPU	39.90%	60.10%
PPU BU	74.47%	25.53%
PPU PN	92.65%	

Februari

Komposisi berdasarkan Status Aktif Peserta
Periode: February 1, 2025

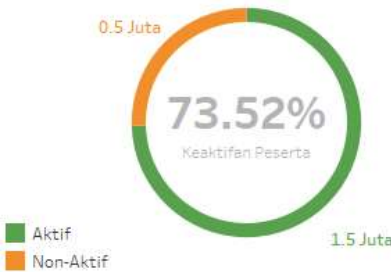


berdasarkan Segmen Kepesertaan

PBPU PEMDA	63.34%	36.66%
PBI JK	82.71%	
BP	88.71%	
PBPU	39.69%	60.31%
PPU BU	74.52%	25.48%
PPU PN	93.62%	

Maret

Komposisi berdasarkan Status Aktif Peserta
Periode: March 1, 2025



berdasarkan Segmen Kepesertaan

PBPU PEMDA	64.04%	35.96%
PBI JK	82.64%	
BP	88.88%	
PBPU	38.60%	61.40%
PPU BU	75.10%	24.90%
PPU PN	79.98%	20.02%

April

Komposisi berdasarkan Status Aktif Peserta
Periode: April 1, 2025



berdasarkan Segmen Kepesertaan

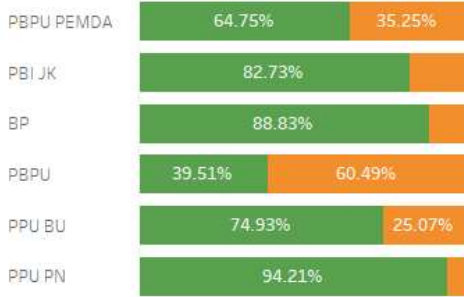
PBPU PEMDA	64.21%	35.79%
PBI JK	82.69%	
BP	88.94%	
PBPU	37.88%	62.12%
PPU BU	75.37%	24.63%
PPU PN	94.16%	

Mei

Komposisi berdasarkan Status Aktif Peserta
Periode: *May 1, 2025*

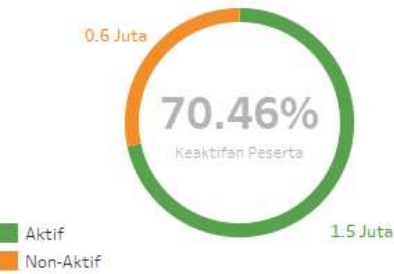


berdasarkan Segmen Kepesertaan

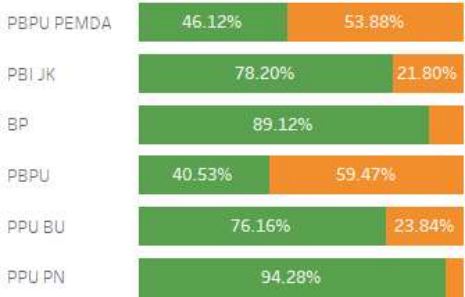


Juni

Komposisi berdasarkan Status Aktif Peserta
Periode: *June 1, 2025*



berdasarkan Segmen Kepesertaan

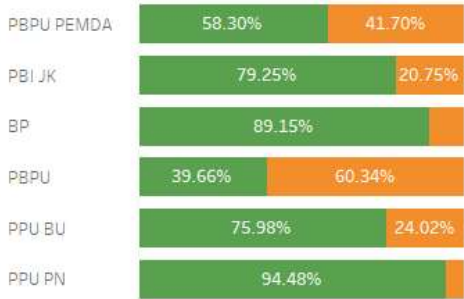


Juli

Komposisi berdasarkan Status Aktif Peserta
Periode: *July 1, 2025*



berdasarkan Segmen Kepesertaan



- PBPU Pemda** : Pekerja Bukan Penerima Upah Pemda / Penerima Bantuan Pemda
- PBI JK** : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan / Penerima Bantuan Pusat
- BP** : Bukan Pekerja (Investor, Pemberi Kerja, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pensiunan)
- PBPU** : Pekerja Bukan Penerima Upah / Mandiri
- PPU BU** : Pekerja Penerima Upah Badan Usaha / Pekerja Swasta
- PPU PN** : Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara / ASN, TNI, Polri

CAPAIAN UHC JANUARI S.D JULI TAHUN 2025

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Jumlah Penduduk	2.059.458	2.059.458	2.059.458	2.066.426	2.066.426	2.066.426	2.066.426
Jumlah Penduduk berJKN	2.024.610	2.027.485	2.030.253	2.032.830	2.035.736	2.030.967	2.022.477
Capaian UHC (%)	98,31	98,45	98,58	98,37	98,51	98,28	97,87
Jumlah Total Peserta Aktif	1.521.768	1.523.115	1.514.082	1.524.102	1.529.734	1.455.986	1.479.769
Jumlah Total Peserta Tidak Aktif	502.842	504.370	516.171	508.728	506.002	574.981	542.708
Persentase Tingkat Keaktifan (%)	73,89	73,96	73,52	73,76	74,03	70,46	71,61
PBPU Pemda	167.119	167.596	168.762	170.347	170.809	145.831	141.707
Aktif	105.496	106.152	108.077	109.377	110.606	67.258	82.612
Persentase Aktif (%)	63,13	63,34	64,04	64,21	64,75	46,12	58,30
Tidak Aktif	61.623	61.444	60.685	60.970	60.203	78.573	59.095
Persentase Tidak Aktif (%)	36,87	36,66	35,96	35,79	35,25	53,88	41,70
PBI JK	1.267.184	1.265.264	1.262.870	1.260.598	1.258.539	1.295.215	1.292.356
Aktif	1.048.225	1.046.510	1.043.647	1.042.438	1.041.196	1.012.818	1.024.195
Persentase Aktif (%)	82,72	82,71	82,64	82,69	82,73	78,20	79,25
Tidak Aktif	218.959	218.754	219.223	218.160	217.343	282.397	268.161
Persentase Tidak Aktif (%)	17,28	17,29	17,36	17,31	17,27	21,80	20,75
BP	22.437	22.382	22.310	22.234	22.158	22.022	22.001
Aktif	19.859	19.856	19.829	19.775	19.684	19.626	19.613
Persentase Aktif (%)	88,51	88,71	88,88	88,94	88,83	89,12	89,15
Tidak Aktif	2.578	2.526	2.481	2.459	2.474	2.396	2.388
Persentase Tidak Aktif (%)	11,49	11,29	11,12	11,06	11,17	10,88	10,85
PBPU	250.753	253.817	256.175	258.285	260.614	247.765	246.224
Aktif	100.058	100.744	98.887	97.838	102.965	100.413	97.652
Persentase Aktif (%)	39,90	39,69	38,60	37,88	39,51	40,53	39,66
Tidak Aktif	150.695	153.073	157.288	160.447	157.649	147.352	148.572

Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
Persentase Tidak Aktif (%)	60,10	60,31	61,40	62,12	60,49	59,47	60,34
PPU BU	251.214	252.718	254.323	255.073	257.262	253.635	253.054
Aktif	187.072	188.336	191.008	192.255	192.771	193.174	192.268
Persentase Aktif (%)	74,47	74,52	75,10	75,37	74,93	76,16	75,98
Tidak Aktif	64.142	64.382	63.315	62.818	64.491	60.461	60.786
Persentase Tidak Aktif (%)	25,53	25,48	24,90	24,63	25,07	23,84	24,02
PPU PN	65.903	65.708	65.813	66.293	66.354	66.499	67.135
Aktif	61.058	61.517	52.634	62.419	62.512	62.697	63.429
Persentase Aktif (%)	92,65	93,62	79,98	94,16	94,21	94,28	94,48
Tidak Aktif	4.845	4.191	13.179	3.874	3.842	3.802	3.706
Persentase Tidak Aktif (%)	7,35	6,38	20,02	5,84	5,79	5,72	5,52

FREQUENTLY ASK QUESTIONS (FAQs)

1. Kartu BPJS saya tiba-tiba tidak aktif, apa yang harus saya lakukan?

Ada banyak faktor yang menyebabkan para penerima bantuan iuran mengalami penonaktifan. Untuk peserta segmen PBI JK, penyebab yang sering terjadi adalah:

- Yang bersangkutan tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data DTKS tersebut diusulkan oleh desa dan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial.
- Data kependudukan Yang bersangkutan atau Anggota Keluarga yang bersangkutan tidak valid/tidak padan/tidak online (Integrasi Data Kemensos dengan Dirjen Capil)
- Data jenis pekerjaan Yang bersangkutan atau Anggota Keluarga yang bersangkutan yang terekam dalam KTP El merupakan jenis pekerjaan yang tidak layak mendapatkan bantuan (PNS, TNI/POLRI, Dokter, Apoteker, Bidan, Perawat, Perangkat Desa, DPRD, DPR, dll) (Integrasi Data Kemensos dengan Dirjen Capil)
- Yang bersangkutan atau Anggota Keluarga yang bersangkutan terdata sebagai guru penerima sertifikasi (Integrasi Data Kemensos dengan Kemendiknas)
- Yang bersangkutan atau Anggota Keluarga yang bersangkutan terdata sebagai pekerja dengan penghasilan sesuai/di atas UMR (Integrasi Data Kemensos dengan BPJS Ketenagakerjaan)
- Yang bersangkutan atau Anggota Keluarga yang bersangkutan terdata sebagai pengguna listrik dengan KWH tertentu (Integrasi Data Kemensos dengan PLN)
- Yang bersangkutan tercatat pindah ke luar Kabupaten Brebes (Integrasi Data Kemensos dengan Dirjen Capil)
- Yang bersangkutan atau Kepala Keluarga tercatat meninggal (Integrasi Data Kemensos dengan Dirjen Capil)
- Yang bersangkutan atau Anggota Keluarga yang bersangkutan tercatat sebagai pemilik usaha dengan modal tertentu (Integrasi Data Kemensos dengan Kemenkumham)
- Kebijakan Kemensos lainnya

Adapun untuk peserta segmen PBPU Pemda, penyebab yang sering terjadi adalah:

- Data kependudukan Yang bersangkutan tidak valid/tidak padan/tidak online (Sinkronisasi Data PBPU Pemda dengan Dirjen Capil)
- Yang bersangkutan tercatat atau dilaporkan meninggal atau pindah ke luar Kabupaten Brebes (Sinkronisasi Data PBPU Pemda dengan Dirjen Capil, Laporan Puskesmas/Desa)
- Hasil Audit BPK/BPKP/Inspektorat
- Keterbatasan anggaran

Yang harus dilakukan:

- Laporkan kepada desa bahwa status JKN anda tidak aktif
- Bilamana anda tidak masuk dalam DTKS, maka anda bisa melaporkan kondisi rumah dan data yang dibutuhkan oleh desa sebagai dasar usulan kedalam DTKS
- Bilamana anda layak mendapatkan bantuan, maka Desa akan memasukkan anda ke dalam data DTKS
- Dinsos akan memverifikasi usulan DTKS tersebut
- Selanjutnya anda harus menunggu Penetapan dari Kementerian Sosial yang menyatakan anda sebagai peserta PBI JK

2. Saya peserta mandiri, tetapi saya ingin agar Bpjs saya dibiayai pemerintah. Apa yang harus saya lakukan?

Bila Anda merasa masuk dalam kategori tidak mampu, silahkan melaporkan diri Anda ke desa. Desa akan melakukan penilaian untuk memverifikasi keterangan Anda. Selanjutnya bila memenuhi kriteria tidak mampu, desa akan mengusulkan data Anda ke dalam DTKS untuk selanjutnya masuk dalam antrian usulan PBI JK. Berapa lama proses tersebut berlalu, tergantung dari kuota yang tersedia di Kemensos. Pada akhirnya, manusia hanya bisa merencanakan namun

Tuhan pulalah yang memutuskan. Selain itu Desa juga bisa mengirimkan usulan PBPU Pemda ke Dinkes, terutama untuk kasus yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kepesertaan JKN segmen PBPU Anda akan diproses untuk aktif pada tanggal 1 di bulan berikutnya selama Anda dan seluruh anggota keluarga memiliki data kependudukan yang valid dan online.

Bila Anda merupakan sasaran prioritas program puskesmas, silahkan melaporkan diri Anda ke Puskesmas. Puskesmas akan mengirimkan usulan PBPU Pemda ke Dinkes untuk selanjutnya diteruskan kepada BPJS Kesehatan. Kepesertaan JKN Anda akan diproses untuk aktif pada tanggal 1 di bulan berikutnya selama Anda dan seluruh anggota keluarga memiliki data kependudukan yang valid dan online.

3. Saya sudah masuk dalam data DTKS, tetapi kenapa saya belum mendapatkan Bpjs yang dibiayai pemerintah?

Kuota PBI JK terbatas, sehingga tidak semua usulan yang dikirimkan oleh seluruh Kabupaten di Indonesia akan disetujui.

4. Anak saya sedang dirawat di rumah sakit, tetapi Bpjsnya tidak aktif. Bagaimana caranya supaya aktif?

Bagi peserta PBI JK ataupun PBPU Pemda Non Aktif, bisa mempertimbangkan untuk alih segmen ke Mandiri (PBPU). Silahkan berkonsultasi dengan kantor BPJS Kesehatan untuk memilih alternatif yang paling memungkinkan.

Bagi peserta Mandiri menunggak, silahkan membayar tunggaknya dan kepesertaan JKN keluarga Anda akan aktif setelahnya. Namun perlu diingat, ada denda rawat inap yang harus dibayarkan bilamana anak Anda sedang rawat inap.

5. Istri saya dulu bekerja di PT. Tetapi sudah keluar. Kenapa Bpjsnya menjadi tidak aktif?

Peserta JKN yang bekerja di PT merupakan peserta segmen PPU yang iuran JKNnya dibayarkan oleh Perusahaan dan Istri Anda sendiri. Otomatis bila Istri Anda keluar dari Perusahaan atas keinginan sendiri, Perusahaan sudah tidak berkewajiban membayarkan iuran JKN istri Anda.

6. Dulu saya mendapat Bpjs yang dibiayai pemerintah tetapi setelah itu masuk PT. Sekarang saya sudah keluar dari PT. Bagaimana caranya agar saya bisa mendapat Bpjs yang dibiayai pemerintah lagi?

Silahkan laporkan ke desa dan update data jenis pekerjaan Anda di KTP El. Nanti desa akan melakukan penilaian untuk melihat apakah Anda masih masuk kriteria tidak mampu dan mengusulkannya dalam DTKS dan PBI JK. Selain itu Desa juga bisa mengirimkan usulan PBPU Pemda ke Dinkes, terutama untuk kasus yang membutuhkan pelayanan kesehatan..

7. Dulu bayi saya punya Bpjs yang dibiayai pemerintah, tetapi kenapa sekarang sudah tidak aktif?

Bayi yang lahir dari Ibu penerima bantuan iuran akan otomatis mendapatkan kepesertaan JKN dengan status bayi Ny. XXXX. Kepesertaan tersebut akan otomatis dinonaktifkan bilamana dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, bayi tersebut tidak tercatat dalam data Dirjen Capil. Untuk itu, sebelum 3 (tiga) bulan, bayi tersebut harus diurus data kependudukannya dan dilaporkan ke Operator DTKS Desa serta BPJS Kesehatan. Bila sudah terlanjur non aktif, maka Bayi tersebut harus diusulkan ulang oleh Desa sebagai peserta PBI JK atau PBPU Pemda. Bila Bayi tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan, puskesmas juga bisa mengusulkan sebagai peserta PBPU Pemda.

8. Kartu Bpjs saya aktif, tapi kenapa kata RS saya tidak memiliki JKN aktif?

Terkadang NIK yang tercantum dalam Kartu JKN tidak sama dengan KTP El. Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan NIK KTP El sebagai dasar verifikasi kepesertaan. Sehingga meskipun Anda memiliki No Peserta JKN yang aktif dengan nama, alamat, tanggal lahir yang sama dengan KTP El, selama NIK nya berbeda, Anda dianggap bukan peserta aktif dimaksud.

9. Kalau saya tidak masuk DTKS, apakah saya bisa mendapat Bpjs yang dibiayai pemerintah?

Desa dan Puskesmas masih bisa mengusulkan Anda sebagai peserta PBPU Pemda ke Dinkes selama Anda dinilai layak masuk sebagai sasaran program kemiskinan ataupun program prioritas puskesmas. Namun demikian, bilamana dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, Desa tidak mengusulkan Anda ke dalam DTKS, maka kepesertaan PBPU Pemda Anda akan dinonaktifkan.

10. Kenapa sekarang kami sudah tidak bisa mengajukan Bpjs menggunakan SKTM?

Per 1 Januari 2025, Bpjs menerapkan ketentuan tambahan untuk berlangsungnya Skema UHC Non Cut Off (Usul langsung Aktif). Ketentuan tambahan dimaksud adalah tingkat kepesertaan aktif yang membayarkan iuran JKN sebesar 80%. Oleh karena Pemkab tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka Skema UHC Non Cut Off tersebut dicabut.

11. Ada ODGJ yang berkeliaran di desa kami, apakah bisa mendapatkan Bpjs yang dibiayai pemerintah?

Bilamana ODGJ tersebut sudah memiliki rekaman data kependudukan, maka Desa/Puskesmas bisa mengusulkan sebagai peserta PBPU Pemda.

Bilamana ODGJ tersebut belum memiliki rekaman data kependudukan, maka Desa bisa menghubungi Dindukcapil untuk dilakukan perekaman. Bila sudah melakukan perekaman, maka Desa bisa mengusulkan sebagai peserta PBPU Pemda.

12. Ada pasien puskesmas yang memerlukan pengobatan rutin, tetapi Bpjsnya tidak aktif. Apa yang harus puskesmas lakukan?

Sesuai surat edaran yang pernah dikirimkan Dinkes, Puskesmas bisa mengusulkan sebagai peserta PBPU Pemda dengan format sesuai surat ke email jamkesmasbrebes@yahoo.co.id maksimal tanggal 10 setiap bulan. Kepesertaan JKN segmen PBPU Anda akan diproses untuk aktif pada tanggal 1 di bulan berikutnya selama Anda dan seluruh anggota keluarga memiliki data kependudukan yang valid dan online.

13. Sasaran apa saja yang bisa diusulkan oleh Puskesmas?

Ibu hamil tidak mampu dan resti, Ibu nifas tidak mampu, balita stunting, gizi buruk, gizi kurang, Penyandang Disabilitas, ODGJ, pasien TB, pasien Kusta, pasien HIV, lansia, pasien dengan kebutuhan pelayanan kesehatan rutin (HD, Kanker, Jantung, Stroke, dll), pasien dengan kasus kesehatan lainnya.